

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2010. hlm 27-29.
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2002, hlm. 73
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika). 2015, hlm. 25–27.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2008, hlm. 12–15.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm 57-59
- Ali, M. *Sejarah Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009, hlm. 45–47.
- Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister. 2008, hlm. 21–23.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana). 2007, hlm. 212.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana). 2011, hlm. 80.
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* dikutip dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing) 2010, hlm. 125.
- Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. 2017, hlm. 45–48.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Hakim dan Diskresi Peradilan* (Jakarta: Konstitusi Press) 2006, hlm. 45.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan dan Upaya Hukum* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti). 2013, hlm. 121.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Jakarta: Mandar Maju,). 2007, hlm. 193.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika). 2012, hlm. 109–112.

Mulyadi, DR Lilik.” *Bunga rampai hukum pidana, perspektif, teoretis dan praktik*”. Penerbit Alumni. 2008, hlm. 67–69.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) 1983, hlm 107.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983 hlm.89-85

Marpaung, L. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.2014. hlm 45-46

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung). 2007, hlm. 212

Small Arms Survey. *Weapons and Governance: How Small Arms Proliferation Fuels Instability*. Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies.2015. hlm 278-280.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, Politeia. 1996, hlm. 12–14.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.2006. hlm 2.

Sugiyono. *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*, bandung, alfabeta.2019. hlm 8.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2000, hlm. 53–55.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung. 1983, hlm. 15–18.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2012, hlm. 295–298.

Jurnal, Skripsi, Tesis

A Haslinda,” *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Illegal DiKota Tarakan Kalimantan Utara “*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021.

- Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia." *Birokrasi, jurnal ilmu hukum dan tata Negara*. (2025)
- Dedi Komarudin dan Prasetya Anugrah Pratama, "Ancaman Distribusi Small Arms & Light Weapons (SALW) serta Implikasinya terhadap Kondisi Keamanan Global," *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, No.1, tahun (2022).
- Hidayat, A. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Kepemilikan Senjata Api Rakitan Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*. (2020/2021)
- Joyfel Prasetya Sasela, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan," *lex administratum* 12, No 1 Tahun (2023)
- Kori Tujuma Ichsan, Uning Pratimaratri, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg) " *jurnal fakultas hukum, Universitas Bung Hatta*, No 2 Tahun (2021)
- M. Ruba'i, "Politik Hukum Pengaturan Senjata Api di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol.8, No.2. (2019)
- Mahmud, M. 'Penegakan Hukum terhadap Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia'. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.(2019)
- Mahmud, F. (2020). "Analisis Penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Senjata Api Ilegal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Nur Faiz Setiawan, H.Moch Ardi, and Galuh Praharafi Rizqia "Kewenangan Penggunaan Dan Pengadaan Senjata Api Standar Militer Bagi Anggota Korps Brimob Polri Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme," *jurnal Lex Suprema* No.2, September (2020).
- Rahman, A. Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan Perkara Pidana Senjata Api. *Jurnal Ilmu Hukum* (2014)
- Rizki Aulia. (2024). Studi Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Putusan No.191/Pid.Sus/2022/Pn Idi). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Sausan Apriati Rasyid, "Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil di Indonesia" *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, ParePare, (2024)

Siregar, D. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Senjata Api Ilegal di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. (2021-2025)

S. Kusnu Goesniadhie, Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, *Jurnal Hukum* (2007)

Sitti Andriani, Kualitas Hidup Peserta Prolanis Berdasarkan Kepesertaan Prolanis dan Pola Istirahat di Kota Makassar Tahun (2018) (*Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin*).

Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia" Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, No 6, August (2016).

Peraturan Perundang- Undangan

Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzon derestraaf bepalingen" (Stbl.1948 no.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu no 8 tahun 1936, no.170.

Putusan pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI

Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78

Republik Indonesia. (1951). Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Bahan Peledak, dan Senjata Tajam.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.